

## ANALISIS PERAN *STAKEHOLDERS* DALAM TRANSFORMASI PERMUKIMAN KUMUH MENJADI DESTINASI WISATA: STUDI KASUS KAMPUNG WARNA WARNI KOTA MALANG

Angela Clarisa, Intan Anggraini Puspita, Aurellia Safira Azzahra, Dave Nativ Bawono, Karnaia Puguh Syamaya, Prisca Kiki Wulandari

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received Juni 2025

Revised Juni 2025

Accepted Juni 2025

Available online Juni 2025

#### Email:

[angelaclarisa@student.ub.ac.id](mailto:angelaclarisa@student.ub.ac.id),

[Intanpuspita@student.ub.ac.id](mailto:Intanpuspita@student.ub.ac.id),

[karnaiaasyamaya@student.ub.ac.id](mailto:karnaiaasyamaya@student.ub.ac.id),

[aurelliaash@student.ub.ac.id](mailto:aurelliaash@student.ub.ac.id),

[davenativ@student.ub.ac.id](mailto:davenativ@student.ub.ac.id)

[priscakiki@ub.ac.id](mailto:priscakiki@ub.ac.id)



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

### Abstrak

Kampung Warna-Warni Kota Malang merupakan salah satu destinasi menarik bagi para wisatawan yang berkunjung ke Kota Malang. Daya tarik yang dimiliki Kampung ini adalah rumah-rumah di kampung ini di cat warna-warni yang menghasilkan kesan cerah dan menarik oleh para pengunjung. Selain itu, kampung ini juga berawal dari kampung kumuh di daerah bantaran Sungai Brantas karena banyaknya sampah yang tertimbun di sungai. Namun akhirnya kampung ini berubah menjadi kampung wisata yang memiliki banyak daya tariknya seperti banyaknya spot foto dengan rumah yang dihiasi warna cerah dan elok. Kampung Warna-Warni Jodipan di Kota Malang merupakan contoh sukses transformasi kawasan kumuh menjadi destinasi wisata melalui kolaborasi berbagai *stakeholders*, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Para *stakeholder* ini memiliki peran masing-masing dalam rangka mewujudkan Kampung Warna-Warni sebagai salah satu destinasi wisata di Malang. Permasalahan yang terjadi dalam proses kolaborasi adalah ketidakadaan lanjutan tindakan oleh para *stakeholder*. Tidak adanya tindakan lanjutan dalam rangka memelihara Kampung Warna-Warni Kota Malang menyebabkan kampung ini sepi pengunjung apalagi pasca pandemi. Oleh karena itu, artikel ini ditulis untuk mengetahui peran dari masing-masing *stakeholder* serta tanggung jawabnya dalam menjalankan Kampung Warna-Warni. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi literatur.

**Kata Kunci:** Kampung Warna-Warni, Destinasi Wisata, Kolaborasi *Stakeholder*, Daya Tarik Kampung Kampung Warna-Warni, Peran *Stakeholder*

### Abstract

The colorful Village of Malang City is one of the interesting destinations for tourists visiting Malang City. The attraction of this village is that the houses in this village are painted in colorful colors which give a bright and attractive impression to visitors. In addition, this village also started as a slum on the banks of the Brantas River because of the large amount of garbage piled up in the river. However, finally this village turned into a tourist village that has many attractions such as many photo spots with houses decorated with bright and beautiful colors. The colorful Village of Jodipan in Malang City is a successful example of the transformation of a slum area into a tourist destination through collaboration between various *stakeholders*, namely the government, private sector and the community. These *stakeholders* have their respective roles in realizing Colorful Village as one of the tourist destinations in Malang. The problem that occurs in the collaboration process is the lack of follow-up action by *stakeholders*. The lack of follow-up action in maintaining the Colorful Village of Malang City has caused this village to be deserted, especially after the pandemic. Therefore, this article was written to find out the role of each *stakeholder* and their responsibilities in running Kampung Warna-Warni. The research method used in this article is a qualitative research method with data collection techniques through observation, interviews and literature studies.

**Keywords:** Colorful Villages, Tourist Destinations, Stakeholder Collaboration, Village Attractions, Stakeholder Roles

## LATAR BELAKANG

Setiap kota pada dasarnya akan mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan, yang tidak hanya mencakup pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan jumlah penduduk. Pertambahan jumlah penduduk membawa perubahan signifikan terhadap kondisi perkotaan, salah satunya adalah semakin berkurangnya lahan yang layak untuk kawasan permukiman. Akibatnya, muncul permasalahan terhadap pengembangan kawasan di permukiman kumuh yang seharusnya tidak memenuhi standar kelayakan pembangunan. (Muhammad et al, 2019). Permasalahan seperti ini ditemukan di Kota Malang tepatnya di Kampung Jodipan yang berada di bantaran sungai. Kampung Jodipan yang dulunya dikenal sebagai permukiman dan kurang diperhatikan kini telah menjadi salah destinasi wisata Kampung Warna Warni di Kota Malang. Kampung Warna-Warni Jodipan di Kota Malang merupakan contoh sukses transformasi kawasan kumuh menjadi destinasi wisata melalui kolaborasi berbagai stakeholders, seperti pemerintah, swasta dan masyarakat kampung jodipan itu sendiri. Inisiatif tersebut dimulai pada tahun 2016 oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang untuk melaksanakan tugas praktikum, yang selanjutnya didukung oleh pemerintah dan pihak swasta untuk keberlanjutan pengembangan permukiman kumuh di Kampung Jodipan.

Dalam setiap perubahan yang terjadi, tentu tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang ditemukan. Pengembangan permukiman kumuh awalnya memang berjalan dengan baik, namun kurangnya komitmen serta perhatian dari *stakeholders* berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan, karena masyarakat akan sulit mengelola serta mempertahankan hasil pengembangan tanpa adanya dukungan yang berkelanjutan. Berdasarkan observasi awal peneliti, permasalahan selanjutnya yaitu kurangnya transparansi antara para pemangku kepentingan dengan masyarakat. Kurangnya transparansi ini, membuktikan bahwa tidak adanya komunikasi yang efektif antara pemangku kepentingan dengan masyarakat setempat. Hal ini dapat berpengaruh besar terhadap pengembangan dan keberlanjutan dari pengelolaan Kampung Warna-Warni. Hal tersebut perlu dianalisis lebih lanjut terkait peran masing-masing stakeholders dalam mewujudkan kolaborasi yang efektif untuk mencapai tujuan bersama.

Terdapat berbagai penelitian terdahulu yang telah dikaji oleh peneliti sebelumnya, seperti penelitian (Abdillah et al, 2019) yang lebih berfokus terhadap pengembangan destinasi wisata Kampung Warna-Warni dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Penelitian selanjutnya dari (Muhammad et al, 2019) yang menyoroti konsep *collaborative governance* dalam penanganan permukiman kumuh di kawasan tersebut. Meskipun penelitian tersebut juga menjelaskan secara teoritis mengenai *collaborative governance*, namun hingga saat ini, masih belum ada penelitian terbaru yang berfokus untuk membahas peran serta kolaborasi antara *stakeholders*. Penelitian terdahulu secara spesifik belum membahas peran dan kolaborasi stakeholders dalam menjaga keberlanjutan destinasi setelah transformasi terjadi. Hal ini menyebabkan terjadinya gap riset terkait dengan implementasi nyata *collaborative governance* dalam transformasi permukiman kumuh menjadi destinasi wisata Kampung Warna-Warni.

Permasalahan serius yang dihadapi oleh Kampung Warna-Warni Kota Malang seperti kurangnya komitmen dan perhatian dari para pemangku kepentingan serta rendahnya transparansi dalam hubungan antara stakeholders dan masyarakat. Hal ini disebabkan karena kurangnya kolaborasi antara pemerintah, pihak swasta dan juga masyarakat dalam keberlanjutan pengelolaan Kampung Warna-Warni. (Muhammad Aminudin, 2022) Lokasi penelitian dipilih penulis dengan alasan Kampung Warna-Warni Kota Malang yang dapat dikatakan sebagai kampung yang berhasil karena dapat merubah daerah kumuh menjadi kampung yang dijadikan salah satu destinasi wisata di Kota Malang. Keberhasilan dari Kampung Warna-Warni salah satu faktornya adalah peran para stakeholder yang terlibat baik dari

pemerintahan, swasta, dan masyarakat. Keberhasilan ini membuat Kampung Warna-Warni menarik untuk diteliti.

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat di Kampung Warna-Warni serta menelaah kontribusi masing-masing pemangku kepentingan dalam proses pengelolaan dan pengembangan kawasan tersebut sebagai destinasi wisata. Artikel ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi keterbatasan dari penelitian-penelitian terdahulu serta merumuskan rekomendasi strategis guna mendukung pengembangan berkelanjutan Kampung Warna-Warni Kota Malang.

## KAJIAN LITERATUR

Kajian literatur merupakan tahap awal penting dalam penyusunan penelitian. Kegiatan ini mencakup penelusuran berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan publikasi lain untuk memperkaya wawasan peneliti, merumuskan masalah, serta memilih teori dan metode yang sesuai (Neuman, 2011). Kajian ini juga membantu peneliti memahami penelitian terdahulu, menunjukkan penguasaan terhadap bidang studi, serta mengidentifikasi celah penelitian (Berg et al., 2009). Dalam tulisan ini, kajian literatur difokuskan pada teori-teori terkait jejaring pemerintahan dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam pembangunan berbasis kolaborasi. Tujuannya adalah untuk menentukan teori yang paling relevan dalam menganalisis studi kasus Kampung Warna Warni di Kota Malang.

Dalam artikel Berliandaldo et al. (2021), ditegaskan bahwa keterlibatan stakeholder penting untuk memastikan pengembangan pariwisata berjalan sesuai rencana. Teori stakeholder mencakup berbagai pihak seperti investor, masyarakat, dan pemerintah yang memiliki kepentingan terhadap organisasi. Tiga atribut utama stakeholder adalah power (kemampuan mempengaruhi), legitimasi (penerimaan sosial/hukum), dan urgensi (tingkat kepentingan terhadap isu tertentu). Dalam konteks wisata komunitas seperti Jodipan, pendekatan ini relevan untuk menganalisis kontribusi berbagai pihak.

Model Pentahelix yang digunakan Kementerian Pariwisata Indonesia mencakup lima unsur: akademisi, pemerintah, komunitas, bisnis, dan media, semuanya berperan dalam mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Penelitian Nugroho et al. (2022) di Desa Nongkosawit juga menunjukkan lima peran stakeholder: policy creator, coordinator, facilitator, implementor, dan accelerator. Teori stakeholder memetakan relasi dan kontribusi aktor dalam kebijakan kolaboratif, namun kurang menyoroti dinamika hubungan seperti konflik atau ketimpangan kuasa. Kelebihan teori stakeholder terletak pada kemampuannya memetakan relasi dan kontribusi tiap aktor dalam proses pembangunan, serta aplikasinya dalam kebijakan publik berbasis kolaborasi. Namun, teori ini masih lemah dalam menyoroti dinamika hubungan antar aktor, seperti konflik, ketimpangan kuasa, atau akses yang tidak seimbang terhadap sumber daya.

Teori *collaborative governance* menawarkan pendekatan tata kelola yang melibatkan pemerintah dan aktor non-pemerintah secara langsung. Menurut Ansell dan Gash (Astuti et al., 2020), pendekatan ini melibatkan aktor di luar instansi pemerintah secara langsung melalui proses musyawarah dan kesepakatan bersama dalam pengambilan keputusan, khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan dan program publik. Terdapat empat aspek utama dalam *collaborative governance*, yaitu kondisi awal, kepemimpinan, desain kelembagaan, dan proses kolaboratif. Kondisi awal mencakup latar belakang hubungan antar aktor sebelum kolaborasi dimulai, termasuk tingkat kepercayaan, sejarah konflik, dan ketimpangan kekuasaan, yang menentukan kesiapan kerja sama. Kepemimpinan menjadi aspek krusial, di mana pemimpin yang netral dan inklusif dibutuhkan untuk memfasilitasi komunikasi dan mengarahkan proses menuju tujuan bersama. Desain kelembagaan meliputi aturan main yang disepakati semua pihak guna menjamin keadilan, transparansi, dan partisipasi setara dalam

pengambilan keputusan. Sedangkan proses kolaboratif merupakan inti dari pendekatan ini, ditandai oleh dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, dan pemahaman bersama atas tujuan kolaborasi. Dengan demikian, *collaborative governance* memungkinkan pengelolaan pemerintahan yang lebih inklusif dan efektif melalui sinergi berbagai aktor.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, kemajuan yang terjadi tampak nyata melalui perubahan kondisi fisik di Kampung Warna Warni. Dari lingkungan yang sebelumnya terlihat kumuh, kampung ini kini telah bertransformasi menjadi destinasi wisata yang tertata, bersih, dan menarik. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peran aktif warga setempat serta berbagai pihak terkait. Hal ini sejalan dengan *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash, di mana proses transformasi yang terjadi melibatkan kerjasama lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya secara langsung dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Hasilnya tidak hanya memperindah kawasan, tetapi juga mendorong kegiatan ekonomi seperti produksi cinderamata. Pendekatan *collaborative governance* mampu menggambarkan interaksi deliberatif antar aktor dari berbagai sektor dalam pengembangan Kampung Warna Warni. Dengan mempertimbangkan keempat aspeknya, kondisi awal, kepemimpinan, desain kelembagaan, dan proses kolaboratif, teori *collaborative governance* menjadi alat analisis yang tepat dalam menelaah peran para pemangku kepentingan dalam pengembangan Kampung Warna Warni Kota Malang. Meskipun teori ini memiliki keterbatasan dalam menjelaskan hambatan praktis seperti konflik kepentingan atau keterbatasan sumber daya, pendekatan ini tetap dianggap paling relevan sebagai kerangka analisis dalam penelitian ini.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan strategi studi kasus yang terfokus pada Kampung Warna-Warni Jodipan (KWJ), Kota Malang. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman holistik dan mendalam mengenai fenomena transformasi KWJ, utamanya peran masyarakat, serta untuk menganalisis dinamika kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam proses tersebut. Untuk memahami kompleksitas interaksi dan proses kerjasama ini, penelitian dipandu oleh kerangka teori *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash (2008), yang memberikan lensa untuk mengidentifikasi elemen-elemen krusial dalam kolaborasi multipihak. Pemilihan KWJ sebagai studi kasus didasarkan pada statusnya sebagai contoh nyata transformasi lingkungan berbasis partisipasi yang juga menghadapi tantangan keberlanjutan, sehingga memungkinkan eksplorasi intensif terhadap dinamika kolaboratif dalam konteks spesifik.

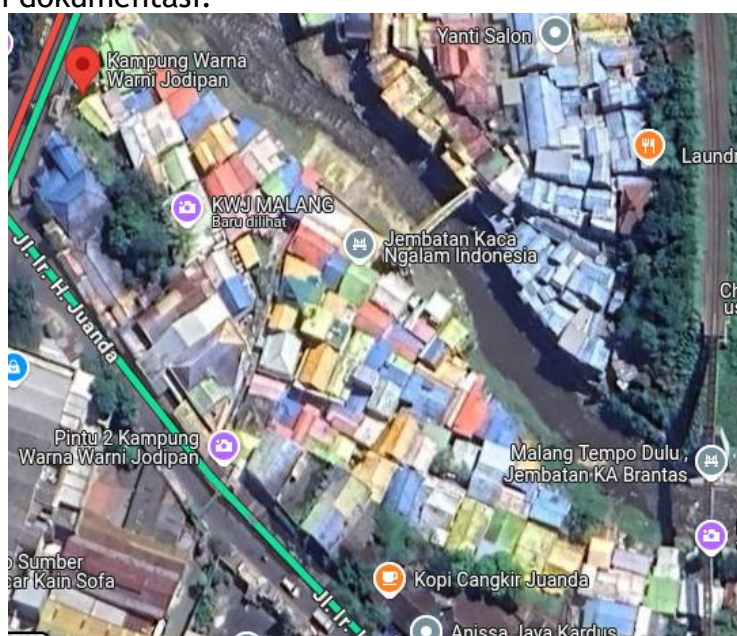
Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi non-struktural langsung di Kampung Warna-Warni Jodipan guna mengamati aktivitas, interaksi antar stakeholder, dan manifestasi praktik kolaborasi sehari-hari. Selanjutnya, wawancara mendalam semi-terstruktur dilaksanakan dengan informan kunci untuk menggali persepsi, pengalaman, serta pandangan mereka terkait peran masing-masing pihak dan tantangan dalam proses kolaborasi. Data sekunder dihimpun melalui studi dokumentasi dan literatur, mencakup laporan, publikasi media, artikel ilmiah, dan peraturan terkait yang relevan dengan transformasi KWJ serta prinsip-prinsip tata kelola kolaboratif. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan memilih individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung mengenai proses transformasi dan pengelolaan kolaboratif di KWJ, sehingga dapat memberikan informasi yang kaya dan relevan dengan fokus analisis yang dipandu oleh teori Ansell dan Gash. Kriteria utama adalah individu yang dianggap dapat memberikan wawasan mendalam sesuai dengan fokus penelitian.



Berikut adalah daftar informan kunci yang terlibat dalam penelitian ini:

| No. | Nama Informan     | Peran/Status                             | Keterangan                                                                      |
|-----|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Bapak Sony Parin  | Ketua RW 02, Kelurahan Jodipan           | Memberikan perspektif kepemimpinan lokal, sejarah, dan pengelolaan komunitas    |
| 2.  | Ibu Siti Masruroh | Pelaku usaha warung di KWJ & warga lokal | Memberikan perspektif pelaku UMKM, ekonomi lokal, dan sebagai warga             |
| 3.  | Bapak Agus        | Warga lokal yang menetap di KWJ          | Memberikan perspektif sebagai warga yang merasakan langsung dampak transformasi |
| 4.  | Bapak Suep        | Warga lokal yang menetap di KWJ          | Memberikan perspektif sebagai warga yang merasakan langsung dampak transformasi |

Penelitian dilakukan di Kampung Warna Warni Kota Malang, sebuah kawasan yang berhasil bertransformasi dari permukiman kumuh menjadi destinasi wisata tematik. Pengumpulan data dilaksanakan pada tahun ini yaitu 2025, mencakup observasi lapangan, wawancara, dan studi dokumentasi.



Gambar 1.1

*Peta Wilayah Kawasan Wisata Kampung Warna Warni Kota Malang*

#### a. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif interaktif. Proses analisis dimulai dengan mereduksi seluruh data mentah yang terkumpul dari hasil wawancara mendalam bersama para informan kunci (Bapak Sony Parin, Ibu Siti Masruroh, Bapak Agus, dan Bapak Suep), catatan observasi lapangan, serta dokumen-dokumen pendukung. Data tersebut

kemudian diseleksi, difokuskan pada aspek peran masyarakat dan dinamika tata kelola kolaboratif di KWJ, disederhanakan, lalu diorganisir melalui pengkodean untuk menemukan tema-tema relevan. Selanjutnya, data yang telah terorganisir ini disajikan, terutama dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis, guna memudahkan identifikasi pola-pola dan hubungan antar tema. Tahap akhir melibatkan penarikan kesimpulan, di mana makna dari temuan-temuan diinterpretasikan secara cermat dan diverifikasi kembali dengan data awal, lalu dikaitkan dengan kerangka teori *Collaborative Governance* untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam dan kontekstual terhadap fenomena di Kampung Warna-Warni Jodipan.

## b. Sumber Data

Penelitian ini mengandalkan data primer dan sekunder untuk memahami secara mendalam peran sentral masyarakat dalam dinamika Kampung Warna-Warni (KWJ), dengan fokus pada aspek tata kelola kolaboratif yang dianalisis melalui teori *Collaborative Governance* Ansell & Gash. Data primer dihimpun melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dari komunitas, meliputi Bapak Sony Parin (Ketua RW 02 Kelurahan Jodipan dan para pelaku UMKM. Wawancara ini bertujuan menggali perspektif otentik mereka mengenai tata kelola di tingkat komunitas, inisiatif lokal, kontribusi ekonomi UMKM, serta resiliensi dan strategi adaptif masyarakat dalam menjaga keberlanjutan KWJ, termasuk pengalaman dan persepsi mereka terhadap proses kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya. Sementara itu, data sekunder berupa dokumen kebijakan pemerintah daerah terkait penataan kawasan dan urban, pariwisata berbasis komunitas, dan praktik tata kelola partisipatif dianalisis untuk menyediakan landasan kontekstual, historis, dan pemahaman mengenai kerangka kerja kolaboratif yang mempengaruhi komunitas. Integrasi kedua jenis data ini memungkinkan analisis yang terfokus pada peran krusial serta strategi adaptif masyarakat KWJ, yang digerakan oleh kepemimpinan lokal dan geliat UMKM, dalam menghadapi tantangan keberlanjutan yang berkaitan erat dengan dinamika kolaborasi para pemangku kepentingan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kondisi Awal

Pada kondisi awal dalam teori *Collaborative Governance* terdapat indikator yaitu adanya ketidakseimbangan antara para stakeholder dari sisi sumber daya dan kekuatan. Hal ini berarti perbedaan kekuatan antara satu stakeholder dengan stakeholder lainnya yang kemudian dapat membentuk pola kerja sama sehingga mencapai satu tujuan. Kampung Warna Warni dibentuk pada Tahun 2016 dan diawali oleh proyek KKN Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang dengan tujuan untuk mengubah kampung kumuh menjadi lebih layak huni. Antusiasme masyarakat yang tinggi serta perubahan yang signifikan, mendorong pihak pemerintah dan swasta untuk andil dalam mendukung terbentuknya Kampung Warna Warni. Peran pemerintah dalam proses awal adalah memberikan dukungan berupa perizinan dan koordinasi dengan Dinas Pariwisata melalui ketua RW. Selain itu, swasta juga memiliki kontribusi besar dalam mendukung langkah awal pembangunan Kampung Warna Warni yaitu pihak swasta, dalam hal ini PT Indana, menjadi sponsor utama melalui pemberian cat dan dana. Dengan peran, tujuan, serta sumber daya yang beda pada setiap *stakeholder*, baik masyarakat, pemerintah maupun swasta ikut andil dalam proses kondisi awal terbentuknya *Collaborative Governance* dalam Kampung Warna Warni.

### Kepemimpinan

Kepemimpinan dalam proses kolaborasi yang terjalin dalam pengembangan serta pengelolaan Kampung Warna-Warni memiliki peran penting untuk memastikan setiap pemangku kepentingan dapat terlibat aktif dan saling bekerjasama dalam mewujudkan kolaborasi dan

tujuan bersama. Menurut Ansell dan Gash (Astuti et al., 2020, 42), Kepemimpinan dalam konteks teori collaborative governance mencakup 4 indikator didalamnya. *Pertama*, Pemimpin mempromosikan partisipasi yang luas dan aktif. *Kedua*, Pemimpin memastikan luas pengaruh dan kendali. *Ketiga*, pemimpin memfasilitasi dinamika kelompok yang produktif. *Terakhir*, Pemimpin memperluas ruang lingkup proses. Kepemimpinan dalam pengelolaan Kampung Warna-Warni Kota Malang dipimpin langsung oleh Ketua RW yakni Soni Parin. Selain menjadi Ketua RW di Kampung Warna-Warni tersebut, beliau juga merupakan ketua dari kepengurusan pada pengelolaan Kampung-Warna Warni.

Kepemimpinan dalam pengelolaan Kampung Warna-Warni Kota Malang menunjukkan peran yang signifikan dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dan *stakeholders*. Ketua RW selaku pemimpin juga menjabat sebagai ketua tim pengelola, yang tidak hanya mendorong keterlibatan warga melalui musyawarah dan pembagian tugas yang jelas, tetapi juga memastikan keberlangsungan kegiatan harian seperti penjagaan tiket, kebersihan, dan keamanan lingkungan. Partisipasi aktif masyarakat tersebut menunjukkan bahwa adanya peran pemimpin yakni Ketua RW dan tim pengurus lainnya dapat memberikan ruang partisipasi seluas-luasnya bagi masyarakat Kampung Warna-Warni.

Struktur yang telah ditetapkan dalam pengelolaan Kampung Warna-Warni memudahkan proses koordinasi dan pelaksanaan tugas agar dapat berjalan efektif. Dalam hal ini, Ketua RW menjadi pusat koordinasi antara para pemangku kepentingan seperti pemerintah, pihak swasta dan juga masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya koordinasi langsung yang terjalin dari Dinas Pariwisata dan PT Indana Paint. Terbentuknya koordinasi dan kerjasama yang terjalin membuktikan bahwa pemimpin yakni Ketua RW mampu memperluas dukungan dari pihak eksternal yaitu pemerintah dan swasta untuk pengelolaan Kampung Warna-Warni.

Pembagian tugas yang jelas dalam pengelolaan Kampung Warna-Warni yang dipimpin oleh Ketua RW juga mengedepankan musyawarah bersama dalam setiap pengambilan keputusan. Rapat evaluasi rutin serta pengaturan kegiatan harian menunjukkan adanya pengelolaan interaksi sosial yang efektif dan berkelanjutan. Dalam hal ini, jika pemimpin tidak dapat menjalankan perannya secara strategis dan proaktif, maka potensi untuk memperluas jejaring kerja yang sama yang luas juga akan sulit terwujud bahkan terhambat. Ketua RW telah menjalankan perannya secara aktif yang dibuktikan adanya kerjasama dari pemerintah dan swasta untuk memberikan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengelolaan Kampung Warna-Warni.

## Desain Institusional

Pengembangan desain tata kelola kolaboratif yang efektif dan berkelanjutan untuk Kampung Warna-Warni Jodipan (KWJ) menjadi penting guna menjaga vitalitas dan menjawab tantangan pengelolaan jangka panjang. Perancangan model ini didasarkan pada observasi kondisi aktual di KWJ serta wawancara mendalam dengan representasi komunitas, yakni Bapak Sony Parin selaku Ketua RW 02 Kelurahan Jodipan, dan sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang pandangannya menjadi inti dari usulan ini. Kerangka teoritis yang digunakan adalah tata kelola kolaboratif (Collaborative Governance) dari Ansel dan Gash (2008), yang menekankan pembentukan forum di mana lembaga publik melibatkan aktor non-negara dalam pengambilan keputusan kolektif, formal, berorientasi konsensus, dan deliberatif untuk mengelola program publik. Keberhasilan model ini bergantung pada desain institusional yang tepat, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi yang membangun kepercayaan serta pemahaman bersama.

Mengacu pada teori tersebut, diusulkan pembentukan “Forum Kolaboratif Pengelolaan Kampung Warna-Warni Jodipan” sebagai wadah interaksi formal dan berkelanjutan. Aktor kunci dalam forum ini adalah Lembaga Publik, utamanya Pemerintah Kota Malang yang berperan

sentral dalam melegitimasi dan mendukung forum. Aktor sentral lainnya adalah Aktor Non-Negara, dengan fokus utama pada komunitas lokal KWJ yang diwakili oleh tokoh masyarakat seperti Bapak Sony Parin dan para pelaku UMKM. Komunitas ini, berdasarkan data primer menjadi motor penggerak dari bawah (Bottom-Up), penyedia inovasi lokal, serta pelaksana utama kegiatan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Model ini juga membuka ruang bagi keterlibatan aktor non-negara lain yang relevan (seperti sektor swasta, akademisi dan media) sebagai kontributor potensial sesuai kesepakatan bersama dalam forum.

Dalam forum kolaboratif ini, Pemerintah Kota Malang diharapkan bertindak sebagai inisiator dan fasilitator, sementara komunitas lokal (tokoh masyarakat dan pelaku UMKM) berperan aktif dalam seluruh siklus pengelolaan, mulai dari perencanaan, implementasi berbasis komunitas (pengembangan UMKM, atraksi wisata serta pemeliharaan lingkungan), hingga evaluasi memastikan keputusan dengan aspirasi lokal. Mekanisme kerja forum akan menekankan dialog konstruktif, transparansi, pembangunan kepercayaan, dan pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat, sebagaimana prinsip Ansell & Gash. Keberlanjutan KWJ diharapkan tercapai melalui kepemilikan bersama atas program, peningkatan kapasitas komunitas, serta kemampuan adaptasi forum, yang idealnya didukung oleh kebijakan Pemerintah Kota Malang yang melembagakan dan memfasilitasi forum kolaboratif ini.

## Proses Kolaborasi

Proses kolaborasi yang terjadi di Kampung Warna-Warni merupakan inti dari keberhasilan transformasi kawasan permukiman kumuh menjadi destinasi wisata tematik yang menarik dan berkelanjutan. Kolaborasi ini melibatkan berbagai aktor, mulai dari pemerintah, swasta, hingga masyarakat lokal, yang bersama-sama menjalankan peran masing-masing dalam sebuah tata kelola bersama (collaborative governance). Proses kolaborasi ini tidak hanya terjadi dalam bentuk formal, tetapi juga melalui interaksi sosial dan partisipasi aktif warga, yang membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab kolektif terhadap perubahan lingkungan mereka.

Proses kolaborasi di Kampung Warna-Warni bermula dari inisiatif mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) saat program KKN tahun 2016, yang awalnya bertujuan memperbaiki permukiman kumuh tanpa niat menjadikan kampung destinasi wisata. Respons positif pengunjung yang tak terduga mendorong transformasi kampung. Kolaborasi terbentuk secara alami antara warga, didukung pihak swasta dan pemerintah, dengan insentif bersama dan hubungan sosial yang harmonis sebagai modal utama.

Struktur pengelolaan kampung terdiri dari sekitar 15 pengurus dengan tugas jelas, mengkoordinasi, mengambil keputusan, dan menjalankan operasional seperti penjaagaan tiket, kebersihan, keamanan, dan pemasaran. Rapat evaluasi rutin setiap dua bulan atau sewaktu-waktu menjadi forum penting penyelesaian masalah. Meski rapat bersama pemerintah dan swasta tidak rutin, komunikasi informal dan pembinaan berkala tetap terjalin untuk menjaga koordinasi dan memperkuat kerja sama.

Peran pemerintah dalam kolaborasi ini lebih banyak bersifat administratif dan fasilitatif, terutama dalam hal perizinan dan pembenahan infrastruktur. Pemerintah Kota Malang memberikan dukungan awal berupa bantuan dana operasional dan pembangunan fasilitas pendukung, seperti pemasangan pagar oleh Wali Kota. Dinas Pariwisata secara berkala meminta laporan pengunjung sebagai bentuk pengawasan dan koordinasi. Namun, keterlibatan pemerintah tidak berlangsung secara rutin dan berkelanjutan, terutama karena status lahan yang bukan tanah resmi milik pemerintah menjadi kendala dalam pemberian dana APBD khusus untuk pengembangan wisata. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah masih perlu diperkuat agar kolaborasi dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Pihak swasta, khususnya PT Indana Paint, memiliki peran strategis dalam memberikan dukungan sumber daya, terutama pada tahap awal pengembangan kampung. Melalui program



Corporate Social Responsibility (CSR), PT Indana menyediakan cat gratis yang membantu dalam pengembangan kampung wisata serta membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan dan keindahan lingkungan. Untuk memperkuat kerja sama ini, PT Indana dan pengelola Kampung Warna-Warni juga menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) sebagai landasan formal dalam mendukung pengembangan kampung secara berkelanjutan. Dalam MoU tersebut, disepakati bahwa PT Indana berkewajiban menyediakan produk cat dan tenaga ahli untuk pelatihan pengecatan, sedangkan pihak pengelola kampung bertanggung jawab melaksanakan pengecatan sesuai arahan teknis serta menjaga dan merawat hasil pengecatan. Selain itu, MoU juga mengatur hak PT Indana untuk mendapat eksposur merek sebagai bagian dari program CSR, serta kewajiban pihak kampung untuk melaporkan perkembangan dan penggunaan bantuan kepada perusahaan. Kesepakatan ini berlaku dalam periode tertentu dan dapat dievaluasi atau diperpanjang sesuai kebutuhan kedua belah pihak. Dukungan ini tidak hanya berdampak pada aspek visual, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui meningkatnya kunjungan wisatawan dan aktivitas usaha warga. Namun, setelah pandemi COVID-19, dukungan dari PT Indana menurun signifikan dan kini hanya berupa potongan harga pembelian cat. Kondisi ini menuntut masyarakat untuk lebih mandiri dalam mengelola kampung dan mencari sumber dana alternatif.

Partisipasi aktif masyarakat menjadi kekuatan utama dalam proses kolaborasi ini. Warga tidak hanya terlibat dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah dan rapat pengurus, tetapi juga dalam pelaksanaan kegiatan fisik seperti kerja bakti, menjaga kebersihan, keamanan, dan pengelolaan tiket masuk. Kesadaran tinggi masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan membuat hambatan kebersihan hampir tidak ada, bahkan kerja bakti dilakukan secara spontan berdasarkan kebutuhan. Kegiatan ekonomi warga, seperti warung dan jasa parkir, berjalan mandiri dan turut memperkuat keberlanjutan sosial-ekonomi kampung.

Meski proses kolaborasi di tingkat masyarakat berjalan baik, kolaborasi lintas sektor masih menghadapi sejumlah tantangan. Tidak adanya forum dialog formal yang melibatkan semua stakeholder secara bersama-sama menyebabkan komunikasi dan koordinasi lebih banyak berjalan secara parsial dan reaktif. Hal ini menghambat terciptanya pemahaman dan visi bersama yang menjadi landasan utama dalam collaborative governance. Kolaborasi yang terbentuk juga lebih banyak bersifat sektoral dengan kontribusi besar dari warga sedangkan dari aktor eksternal masih terbilang minim karena belum berkelanjutan. Oleh karena itu, proses kolaborasi antar aktor belum optimal dan perlu diperkuat melalui mekanisme komunikasi yang lebih terstruktur, peningkatan peran serta pemerintah dan swasta, serta pembangunan kepercayaan bersama untuk mencapai tujuan kolaborasi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap proses kolaborasi dalam pengembangan Kampung Warna Warni Jodipan Kota Malang, berikut adalah kesimpulan berdasarkan masing-masing indikator dari *Collaborative Governance* oleh Ansell & Gash (2008):

1. Kondisi Awal : Kondisi awal kolaborasi di Kampung Warna-Warni ditandai dengan ketimpangan sumber daya antar stakeholder, namun berhasil mendorong terbentuknya kerja sama antara masyarakat, pemerintah, dan swasta dalam mewujudkan tujuan bersama melalui dukungan perizinan, pendanaan, dan partisipasi aktif.
2. Kepemimpinan : Pemimpin mempromosikan partisipasi yang luas dan aktif, terbukti efektif dijalankan oleh Ketua RW Kampung Warna-Warni yang juga menjabat sebagai ketua kepengurusan melalui musyawarah rutin dan pembagian tugas yang jelas, sehingga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan stakeholders dalam setiap proses pengelolaan serta membuat kolaborasi berjalan optimal.

3. Desain Institusional : Pengembangan desain tata kelola kolaboratif yang efektif dan berkelanjutan di Kampung Warna-Warni Jodipan diwujudkan melalui pembentukan Forum Kolaboratif yang melibatkan Pemerintah Kota Malang sebagai fasilitator dan komunitas lokal sebagai pelaku utama, sehingga menciptakan mekanisme pengelolaan yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada musyawarah mufakat untuk menjaga keberlanjutan program.
4. Proses Kolaboratif : Proses kolaborasi di Kampung Warna-Warni melibatkan peran aktif masyarakat, pemerintah, dan swasta, namun masih didominasi oleh kontribusi warga karena mekanisme komunikasi lintas sektor belum optimal. Untuk mencapai kolaborasi yang lebih efektif dan berkelanjutan, diperlukan forum dialog formal serta peningkatan peran pemerintah dan swasta.

Berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan dan keberlanjutan Kampung Warna-Warni Kota Malang berdasarkan permasalahan dan hasil analisis dalam artikel:

1. Meningkatkan komitmen dan koordinasi antar stakeholder (pemerintah, swasta, masyarakat) dengan membuat forum komunikasi rutin agar setiap pihak aktif terlibat dalam pemeliharaan dan pengembangan kawasan wisata
2. Mengembangkan inovasi kampung, seperti menambah spot foto baru, event budaya, atau produk kreatif khas Kampung Warna-Warni untuk menarik lebih banyak pengunjung.
3. Menjalin kerjasama yang lebih luas dengan pihak swasta dan akademisi, misalnya untuk program CSR, penelitian, atau pendampingan pengembangan wisata berbasis komunitas.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan media sosial dan teknologi digital untuk promosi destinasi secara berkelanjutan dan menjangkau pasar wisatawan yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. N. (2019). Dampak Sosial dan Ekonomi Masyarakat Kampung Warna Warni Jodipan Kota Malang. *Ji\_Mild (Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi)*, 10(2).
- Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengelolaan BumDes di Kabupaten Semarang (Studi Kasus BumDes Mitra Sejahtera Desa. (n.d.). <http://www.fisip.undip.ac.id>
- Ardiansyah, F. W., Purnaweni, H., & Priyadi, B. P. (2023). Analisis Collaborative Governance Dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(3), 741-756.
- Astuti, Retno Sunu., dkk. 2020. Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik. Semarang: Universitas Diponegoro Press
- Berliandaldo, M. ., Chodiq, A. ., & Fryantoni, D. . (2021). Kolaborasi dan Sinergitas Antar Stakeholder dalam Pembangunan Berkelanjutan Sektor Pariwisata Di Kebun Raya Cibinong. *INOBI: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 4(2), 221 - 234.
- B. F. Sanah, I. W. (2021). Dampak adanya Kampung Warna-Warni Malang bagi perubahan sosial dan dinamika masyarakat setempat. *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*, 419-424.
- Berg, Bruce L.; & Howard Lune (2009). *Qualitative Research Methods for the Social Sciences*. Boston: Pearson
- Liputan6. 2022. Kampung Warna Warni Jodipan di Malang: Sejarah, Lokasi, dan Tiket Masuk. <https://www.liputan6.com/surabaya/read/4849035/kampung-warna-warni-jodipan-di-malang-sejarah-lokasi-dan-tiket-masuk?page=2>. Diakses pada 9 April 2025.
- Magister, M. W., Pendidikan, A., Kristen, U., & Wacana, S. (n.d.). *Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*.

- Marzali, A. (2016). Menulis kajian literatur. *Jurnal Etnografi Indonesia*.
- Muhammad Zacky, N. G. (2019). Collaborative Governance dalam Penanganan Permukiman Kumuh (Studi Kasus Kampung Warna-Warni Jodipan Kota Malang Tahun 2019). 1-33.
- Neuman, W. Lawrence (2011). Social Research Methods. Qualitative and Quantitative Approaches. Boston: Pearson.
- Nugroho, A. Y., Rahman, A. Z., & Kismartini. (2022). Peran stakeholders dalam pengembangan Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(2), 315-335.
- Pendix Annisa Virgin, T. P. (2018). Tourism Development Strategy of Kampung Warna-Warni in Subdistrict Jodipan Malang. 1-16.
- Peran Stakeholder Pada *Placemaking* Kampung Warna-Warni dan Kampung Tridi *under a Creative Commons Attribution (CC-BY-NC-SA) 4.0 International license*. (2021).
- Sahri, R. R. (2021). Potensi Objek Wisata Kampung Warna-Warni Jodipan dalam Meningkatkan Status Sosial dan Ekonomi Masyarakat di Kota Malang. 1-9
- Yunita, I. M., Wijaya, I. N. S., & Surjono, S. (2021). Tingkat keberlanjutan permukiman kampung warna-warni, kelurahan jodipan, kota malang. *Planning for Urban Region and Environment Journal (PURE)*, 10(1), 145-156.